

IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU

Oleh
Keke Vuspita (1401121357)
Keke.vuspita96@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli, M.Si
Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Disability is a people that get its human right and prosperity from the government. Social assistance is an effort for government to welfare all of disability, but the implementation of social assistance for disability, still have so many problem and need to be fix because the process is very lame and complicated. The purpose for this research is to know (1) the implementation of social assistance, (2) factors that affect the implementation of social assistance. Theory that been used in this research is Tachjan Theory: (1) A program to be held, (2) group target or community, (3) Implementor. This research are using descriptive qualitative method. The informan in this research is (1) a chief of social rehabilitation, (1) chief of social rehabilitation for disability, and (1) people that get social assistance. This research are using interview, observation , library studies and documentation using purposive sampling method for the source of information and data analyzing. The result of this research shows that the implementation of social assistance for disability in pekanbaru city still not satisfy, because lack of source of fund for disability in Pekanbaru city ,so the implementation of social assistance for disability didn't goes as it's have.

Key Word: *Implementation, Social Assistance, Disability*

Latar Belakang

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial, termasuk Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya-upaya nyata agar kesamaan dan kesetaraan dengan warga Negara Indonesia lainnya dapat terwujud, terpadu dan berkesinambungan pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan hidup bagi Penyandang Disabilitas. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan Penyandang Disabilitas antara lain rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Upaya rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang derajat kedisabilitasnya tergolong ringan dan sedang dimana mereka masih bisa membantu dirinya sendiri dan/atau keluarganya. Sedangkan upaya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial ditujukan pada mereka yang sudah tidak bisa direhabilitasi dan seluruh kegiatan sehari-hari diserahkan kepada orang lain.

Tugas pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan untuk penyandang disabilitas di tuangkan dalam peraturan daerah provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Di dalamnya dijelaskan bahwa hak-hak bagi penyandang disabilitas yang selayaknya mereka terima dan juga kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkannya dengan memberikan perlindungan serta pemberdayaan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di jelaskan juga bahwa penyandang disabilitas berhak menerima

bantuan sosial sebagaimana yang telah di jelaskan dalam peraturan tersebut. Pada pasal 41 ayat 1 menyatakan:” bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraanya”. Juga disebutkan penerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas itu pada ayat 3 yang menatakan; “bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja, b. Penyandang disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan kerja dan mampu bekerja”. Sedangkan pada ayat 4 disebutkan bahwa “bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berupa: a. bantuan materiil; b. bantuan finansial; c. bantuan fasilitas pelayanan (kemudahan dalam mendapatkan dokumentasi penting, seperti KTP, KK, Akte, Jaminan kesehatan dan lain lain); d. bantuan informasi.

Pada penelitian ini penulis ingin lebih memfokuskan pada pemberian bantuan materiil bagi penyandang disabilitas di kota Pekanbaru karena pemberian bantuan materiil bagi penyandang disabilitas sangat memberikan rasa bermakna yang besar bagi penerimanya dan memberikan dampak jangka panjang. Terlebih jika bantuan yang diberikan berupa modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kehidupan penyandang disabilitas.

Penulis menemukan fenomena, menurut data yang di peroleh dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pada kenyataannya penyandang disabilitas yang ada di kota Pekanbaru masih banyak yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah, padahal mereka tergolong

penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Hal ini membuat terjadinya kecemburuan sosial bagi penyandang disabilitas lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Kemudian, minimnya data yang dimiliki oleh Dinas Sosial yang membuat penyelenggaraan kegiatan bagi penyandang disabilitas sehingga hanya beberapa dari mereka yang dapat diberikan bantuan.

Selain dari Keadaan ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, dimana pemerintah wajib menjamin perlindungan dan pemberdayaan bagi setiap masyarakatnya yang penyandang disabilitas yang dalam kategori ini penulis memfokuskan pada pemberian bantuan sosial berupa bantuan materiil bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan dan dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang di jumpai di lapangan dan telah dikemukakan pada latar belakang masalah serta dikuatkan pula dengan keterangan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
Sebagai masukan serta bahan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi, khususnya tentang Administrasi Publik.
- b. Secara Praktis
 1. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru.
 2. Sebagai bahan informasi kepada pihak lain, yang dapat digunakan pada penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

Konsep Teori

1. Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik menurut **Mulyadi (2015:1)** mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik, kebijakan publik dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi otak pada tubuh manusia, karena melalui instrumen ini, segala aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, pihak swasta dan masyarakat.

Menurut **W.I. Jenkins** dalam **Wahab (2016:15)** merumuskan

kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Agustino (2016:16) kebijakan publik adalah sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintahan tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud.

Menurut **Namura dan Smalwood** dalam **Kusumanegara (2010:4)** kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara tujuan tersebut.

Menurut **Jenkins** dalam **Agustino (2016:17)** kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berhubungan dalam kata lain menjelaskan bahwa kebijakan merupakan proses pembuatan keputusan yang komprehensif meyeritakan banyak stakeholders.

Anderson dalam **Agustino (2016:17)** mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau suatu hak yang diperhatikan.

Thoha (2005:54) mendefinisikan *Public Policy* lebih diartikan sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada bagaimana proses hasil-hasil itu dibuat.

2. Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi kebijakan menurut **Tachjan (2016:26)** mengatakan bahwa fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “*policy delivery system*”. Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah :

- (1) unsur pelaksana (*implementor*),
- (2) adanya program yang akan dilaksanakan,
- (3) *target groups*”

Konsep implementasi kebijakan menurut **Mulyadi (2015:36)** mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik dari kaca mata administrasi publik merupakan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang/lembaga dalam mengimplementasikan tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien serta rasional.

Menurut **Syukur** dalam **Sumaryadi (2005:79)** mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilakukan, (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diterapkan, (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi.

Purwanto dan Sulistyastuti (2015:21) menyatakan implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Menurut **Warwick dalam Subarsono (2005:99)** mengatakan bahwa: “Dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Kemampuan organisasi, implementasi dalam tahapan ini diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu :
 - Kemampuan teknis,
 - Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar unsur terkait.
 - Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan “SOPs” (*Standar Operating Procedures*), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
- 2) Informasi, faktor informasi sangat pula memegang peran penting, karena kurangnya informasi yang dimiliki dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri.
- 3) Dukungan, kurang kesediaan obyek-obyek kebijakan “terikat” kegiatan/kewajiban tertentu dan

kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.

- 4) Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

Metode Penelitian

1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif (gambaran) dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan manipulasi atau perubahan tetapi menggambarkan kondisi apa adanya.

2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, yang terletak di jalan Datuk Setia Maharaja Nomor 6 Kota Pekanbaru. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai suatu masalah yang ingin diteliti. Pemilihan informan penelitian dalam penelitian ini menggunakan

teknik purposive sampling yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Strategi dasar teknik purposive sampling di maksud dengan menetapkan satu atau beberapa orang informasi kunci (key informan) dan melakukan interview dengan menetapkan satu atau beberapa orang diminta arahan, saran, petunjuk siapa baiknya yang menjadi informan berikutnya yang menurut mereka memiliki pengetahuan, pengalaman informasi yang di cari, selanjutnya penentuan informan berikutnya.

Dalam penelitian ini yang dijadikan informan penelitian antara lain :

1. Informan Kunci, adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru
 - b. Kepala seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru
2. Informan Pelengkap adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan ini walaupun tidak terlibat secara langsung dalam permasalahan ini. Adapun yang menjadi pelengkap dalam penelitian ini adalah .
 - a. Salah seorang Penyandang disabilitas di kota Pekanbaru yang pernah menerima bantuan dari Pemerintah Daerah

4. Jenis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka jenis data yang dikumpulkan adalah :

- a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Informan Penelitian yang

berhubungan dengan proses Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.

- b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui instansi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mengenai gambaran umum lokasi penelitian. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer yang telah diperoleh seperti kegiatan, laporan-laporan, sarana dan prasarana serta lampiran-lampiran yang dapat menjelaskan masalah ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut **Sugiyono (2012:62-63)** teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan adalah:

- a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian tentang Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.

- b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di kota Pekanbaru oleh Dinas Sosail dan

Pemakaman, mulai dari penemuan permasalahan sampai penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat memberikan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.

d. Teknik Kepustakaan

Yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur maupun dokumen dari perpustakaan yang berhubungan/berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.

6. Analisa Data

Analisa data ini merupakan aktivitas penalaran dan pengamatan lebih luas mengenai gejala-gejala dan informasi dari hasil penelitian, data-data yang didapat dikumpulkan dan di klasifikasi menurut jenisnya lalu peneliti menganalisa data dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Yaitu berusaha menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Dengan cara ini diharapkan pengkajian masalah dapat berlangsung serta terperinci dalam bentuk tulisan atau tanpa menggunakan teknik perhitungan sistematis. Adapun langkah langkah dalam analisis data deskriptif kualitatif menurut **Miles dan Huberman** dalam **Sugiyono (2008)** meliputi :

a. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan di tuangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci.

Data dan laporan lapangan kemudian di reduksi, di rangkum, dan kemudian di pilah-pilah hal yang pokok, di fokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode, dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

b. Penyajian Data

Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu (Tabel, gambar atau grafik) sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data tersebut kemudian dipilah-pilah menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data dan reduksi

c. Penarik Kesimpulan

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan, sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentative.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang, bahwa implementasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yang mana pada Pasal 41 ayat 1 dikatakan bahwa penyandang disabilitas yang kurang mampu, belum direhabilitasi ataupun sudah direhabilitasi dan belum bekerja berhak menerima bantuan, salah satunya bantuan materiil dari pemerintah daerah. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Pada implementasiannya pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dilakukan dengan dua cara yaitu melakukan program/kegiatan pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan langsung alat bantu disabilitas. Pemberian bantuan sosial yang berupa pelatihan keterampilan berwirausaha di berikan kepada penyandang disabilitas yang masih dalam usia produktif dan mampu bekerja. Penyandang disabilitas yang akan diberikan pelatihan keterampilan dipilih dengan menyesuaikan jenis pelatihan yang akan diberikan dengan keterbatasan penyandang disabilitas yang akan menerima bantuan pelatihan keterampilan, setiap pelatihan yang diberikan akan disertakan dengan

pemberian modal usaha berupa barang ataupun alat sesuai dengan pelatihan keterampilan tersebut. Untuk pemberian bantuan alat bantu disabilitas seperti alat bantu dengar, kursi roda, tongkat dan lain sebagainya, penyandang disabilitas harus melakukan pengajuan proposal permohonan terlebih dahulu yang kemudian pihak Dinas Sosial akan melakukan *survey* kelayakan penerima bantuan.

Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan pengimplementasian pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru menggunakan pendapat **Tachjan (2006:26)**. Menurutnya, ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yakni (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan. (2) Target Group atau kelompok sasaran yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan. (3) Unsur pelaksana/ implementor, baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. :

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan

Dalam implementasi diperlukan adanya program atau kebijakan sebagai pedoman implementor, program atau kebijakan dapat berbentuk peraturan perundangan, peraturan daerah dan keputusan kepala eksekutif atau kepala daerah. Peraturan tersebut dijadikan sebagai pedoman oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai implementor dalam melaksanakan tugas.

Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksananya menyadari terhadap ukuran dan tujuan kebijakan. Begitu halnya dengan Implementasi bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk penyandang disabilitas yang juga

mempunyai ukuran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dapat diketahui bahwa para implementor sudah mengetahui tujuan dan sasaran dari kebijakan pemerintah daerah tentang pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas yang mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 yang mana dijelaskan pada pasal 91 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”. Dijelaskan juga pada pasal 95 bahwa “perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui: a. Bantuan sosial; b. Advokasi sosial; c. Bantuan hukum”

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa Dinas Sosial sebagai implementor melakukan implementasi bantuan sosial sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada peraturan tersebut pasal 91 yang berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.” Kemudian di jelaskan pada pasal 94 ayat (1) yang berbunyi “Pemberdayaan sosial sebagaimana yang dimaksud pada pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerinah Daerah melalui: a. Peningkatan kemauan dan kemampuan; b. Penggalian potensi dan sumberdaya; c. Penggalian nilai dasar; d. Pemberian akses dan; e. Pemberian bantuan usaha”. Dari penjabaran diatas dapat kita lihat pada poin terakhir (e.

Pemberian bantuan usaha), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan usaha untuk penyandang disabilitas. Selain itu juga dijelaskan di pasal 95 poin a yang berbunyi “perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui: a. Bantuan sosial”. Sedangkan pada Peraturan Daerah Provinsi Riau No 18 Tahun 2013 dijelaskan Pada pasal 41 ayat 1 menyatakan:” bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraanya”. Juga disebutkan penerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas itu pada ayat 3 yang menyatakan; “bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja, b. Penyandang disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan kerja dan mampu bekerja”. Sedangkan pada ayat 4 dijelaskan bahwa “bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berupa: a.bantuan materiil; b. bantuan finansial; c. bantuan fasilitas pelayanan (kemudahan dalam mendapatkan dokumentasi penting, seperti KTP, KK, Akte, Jaminan kesehatan dan lain lain); d. bantuan informasi. Pada penjelasan di ayat 4 penulis memfokuskan pada poin pemberian bantuan materiil atau bantuan sosial bagi penyandang siabilitas.

2. Target Group atau Kelompok sasaran

Target Group merupakan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini target group atau kelompok sasaran dari implementasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas itu adalah

seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru. Kebijakan pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas diharapkan memberi dampak yang positif dan juga kesejahteraan bagi penyandang disabilitas yang merupakan kelompok sasaran.

Pada wawancara dengan narasumber menjelaskan bahwa kelompok sasaran implementasi adalah seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru. Pemberian bantuan untuk usia produktif dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan yang mana penyandang disabilitasnya dipilih berdasarkan kemampuan penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan dan memprioritaskan penyandang disabilitas yang paling membutuhkan dalam segi ekonomi. Narasumber juga menjelaskan bahwa untuk mencapai pengimplementasian bantuan sosial secara maksimal, kelompok sasaran juga harus ikut bekerjasama dengan implementor untuk mensukseskan implementasi dengan cara memberi kerjasama dan dukungan. Dukungan yang dimaksud oleh narasumber adalah memberi respon yang positif dan turut membantu memberikan informasi-informasi yang mendukung kepada pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang penyandang disabilitas.

Kepuasan target group atau kelompok sasaran sangatlah penting untuk mengetahui keberhasilan dari suatu kebijakan. Pada penelitian ini kepuasan dan kesejahteraan dari penyandang disabilitas yang menjadi tolak ukur suatu keberhasilan implementasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

Selaku kelompok sasaran, bapak Ryanto menjelaskan bahwa dengan mendapatkan bantuan sosial, kehidupan keluarganya sangat terbantu. Narasumber juga menjelaskan bahwa masih ada penyandang disabilitas yang

membutuhkan bantuan namun belum pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun dari pihak Pemerintah Daerah. Pemberian bantuan sosial diharapkan merata dan mengharapkan penyandang disabilitas yang lain yang belum pernah mendapatkan bantuan juga dapat segera bisa mendapatkan bantuan, dan merasakan kesejahteraan yang sama.

3. Unsur pelaksana atau implementor

Unsur pelaksana yang dimaksud ialah orang yang melaksanakan atau yang mengimplementasikan suatu kebijakan atau biasa disebut implementor. Implementor bisa terdapat pada organisasi ataupun perseorangan yang bertanggungjawab dan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi suatu program.

Dalam proses implementasi kebijakan, pelaksana kebijakan dapat diidentifikasi sebagai berikut; instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah); sektor swasta; LSM maupun komponen masyarakat. Untuk pengimplementasian bantuan sosial di Kota Pekanbaru, tanggung jawab diberikan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber, bahwa pihak Dinas Sosial yang bertanggungjawab terhadap pengimplementasian bantuan sosial untuk penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru memiliki satu bidang khusus untuk menangani rehabilitasi sosial dengan tiga kepala seksi yang salah satunya seksi khusus untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru

Peraturan daerah No 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di dalamnya menjelaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dianggarkan oleh pemerintah dalam APBD Kota Pekanbaru. pada pengimplementasiannya anggaran yang di sediakan masih dirasakan kurang mencukupi untuk pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas.

Narasumber menjelaskan bahwa mereka tidak pernah merasa terbebani dengan tanggung jawab sebagai implementor bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga memiliki harapan tinggi agar adanya peningkatan untuk anggaran bagi penyandang disabilitas Kota Pekanbaru karna mengingat banyaknya penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan dari Pemerintah Daerah. Anggaran yang kurang menyebabkan sebagian penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai calon penerima terpaksa dianggarkan untuk tahun depan. Keadaan ini menyebabkan lambatnya proses pengimplementasian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan membuat kinerja dari Dinas Sosial terlihat kurang maksimal.

PENUTUP

Penulis memberikan kesimpulan dan disertai dengan saran berdasarkan hasil penelitian dan analisa diatas, hal ini sebagai bahan masukan bagi pihak yang bekepentingan dan yang membutuhkan. Berikut kesimpulan dan saran dari penulis :

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan serta analisa yang telah peneliti lakukan dapat di ambil kesimpulan Implementais Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Sebagai Berikut:

1. Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tiga variabel sebagai berikut:
 - a. Pengimplementasin bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah Provinsi Riau No 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. pada pasal 41 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas dengan ekonomi rendah berhak menerima bantuan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan keterampilan dan kewirausahaan serta bantuan alat bantu kedisabilitasian untuk yang mengajukan permohonan bantuan kepada dinas sosial
 - b. Target Group atau kelompok sasaran dari kebijakan ini adalah seluruh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru yang memerlukan bantuan materiil dari Pemerintah Daerah dan memprioritaskan penyandang disabilitas dalam usia produktif untuk program kegiatan pelatihan keterampilan. Sampai tahun 2017 tercatat 87 orang penyandang disabilitas yang telah menerima bantuan dari 330 orang penyandang disabilitas yang tergolong penyandang disabilitas kurang mampu. Dan pada tahun 2018 ada sekitar 39 orang penyandang disabilitas yang menerima bantuan dari pemerintah daerah melalui dana APBD. Angka ini dinilai masih

kurang berarti jika dilihat dari jumlah penyandang disabilitas yang kurang mampu.

- c. Unsur pelaksana/ implementor dari kebijakan ini adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dalam pengimplementasian Dinas Sosial dibantu oleh PSM dan TKSK yang ada di tiap-tiap Kecamatan dan kelurahan untuk membantu baik itu dalam hal pemberian informasi, peninjauan dan lainnya.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas Kota Pekanbaru adalah belum terlaksananya implementasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas terkendala pada anggaran yang dibutuhkan untuk penyandang disabilitas. anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan anggaran yang diperoleh membuat pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru terpaksa membatasi penerima bantuan sosial tiap tahunnya. Ini mengakibatkan pengimplementasian bantuan sosial berjalan lambat dan mendapatkan keluhan dari masyarakat.

2. Saran

Dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran yang sekiranya dianggap perlu untuk dapat di pertimbangkan sebagai bahan masukan mengenai Implementasi Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah daerah Provinsi Riau dapat konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya tentang pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan Diharapkan dalam perencanaan penganggaran untuk kedepannya

pemerintah Daerah baik melalui dana APBN ataupun APBD dapat menganggarkan anggaran sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Pemerintah seharusnya memiliki strategi baru dalam pemberian bantuan sosial. yaitu strategi untuk dapat meminimalkan biaya sehingga penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial bisa lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Asra, Abuzar. 2014. *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta: In Media.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung.
- Tangkilisan, Hassel. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- _____, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Nugroho. 2011. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan*

- Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputering.
- _____. 2012. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputing.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Persons, Wayne. 2011. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik-Teori dan Aplikasi Good governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori , dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik “Konsep, Teori dan Praktik”*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Suryana. 2006. *Kewirausahaan Pedoman Praktis “Kiat dan Proses Menuju Sukses”*. Jakarta: Salemba.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Ineka Cipta
- Thoha, Mifta. 2008. *Ilmu Administrasi Publik kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wahab, A. Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dokumen :

- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Wibesite :

<https://www.kemsos.go.id/>